

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

- Aksinuddin, S. (2022). *Hukum Pertanahan Mengurai Kompleksitas Problem Pertanahan Di Indonesia*. Inteligencia Media.
- Asikin, Z. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press.
- Efendi, B. (1993). *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*. Alumni.
- Fernando M manulang. (2007). *Hukum Dalam Kepastian*. Prakarsa.
- Harsono, B. (2007). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentuk Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*. Djambatan.
- M.P Sihan. (2003). *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktek*. Raja Grafindo Persada.
- Nurgiansah, T. H. (2021). *Pendidikan Pacasila*. CV Mitra Cendekia Media.
- Parlindungan, A. P. (1991). *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah*. CV. Mandar Maju.
- Santoso, U. (2010). *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*. Kencana.
- Santoso, U. (2016). *PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Perspektif, Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*. Kencana.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Soimin, S. (2004). *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*. Sinar Grafika.

- Sudikno Mertokusumo. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sunggono, B. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Supriyadi. (2015). *Dasar-dasar Hukum Perdata Indonesia*. Kiara Science.
- Sutedi, A. (2010). *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika.
- Windari, R. A. (2014). *Hukum Perjanjian*. Graha Ilmu.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
 Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
 Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
 Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan
 Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

C. SUMBER LAINNYA

Apriani, D., & Bur, A. (2021). *Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Jurnal Bina Mulia Hukum, 2(5).

Handayani, P. A., & Dewi, D. A. (2021). *Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Jurnal Kewarganegaraan, 5(1), 8.

Halimah, U. (2018). *Kelurahan Cipadung*. Diambil 14 Agustus 2024, dari <https://uun-halimah.blogspot.com/2018/12/kelurahan-cipadung.html>

Hartanto, A. J. (2015). *Panduan Lengkap Hukum Praktis Kepemilikan Tanah*. LaksBang Justitia.

Iftitah, A. (2014). *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya*. Lex Privatum, II(3), 51.

Kusmaryanto, G. (2017). *Pendaftaran Akta Jual Beli Yang Melebihi Jangka Waktu Pendaftaran Tanah Di Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang*. Jurnal Akta, 4(3).

- Manik, R. G. (2014). *Tanggung Jawab Penjual Terhadap Tanah Yang Bersengketa*. JOM Fakultas Hukum, 1(02).
- Manurung, S. H. R. (2017). *Strategi Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dalam Meminimalisir Permasalahan Tumpang Tindih Sertifikat Tanah (Overlapping) di Kota Pekanbaru*. Jurnal JOM FISIP, 4(2), 6–7.
- Muslih, M. (2013). *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*. Legalitas : Jurnal Hukum, 4(01), 137.
- Pemerintah Kota Bandung. (t.t.-b). Kecamatan Ujungberung. Bandung.go.id. Diambil 18 Agustus 2024, dari <https://www.bandung.go.id/city-directory/info/78/kecamatan-ujungberung>
- Pemerintah Kota Bandung. (t.t.). Kecamatan Panyileukan. Bandung.go.id. Diambil 14 Agustus 2024, dari <https://www.bandung.go.id/city-directory/info/76/kecamatan-panyileukan>
- Putusan Tata Usaha Negara Kota Bandung, (2019), *Putusan PTUN Bandung, 38/G/2020/PTUN.BDG*. Diambil 28 Februari 2024, dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/b2eb68dcf51b6e64679d1a2d500e8310.html>
- Rejekiingsih, T. (2016). *Asas Fungsi Sosial hak atas tanah pada Negara hukum (suatu tunjauan dari teori, yuridis, dan penerapannya di Indonesia)*. Jurnal Yustisia, 2(5), 304.

Uloan, N. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH. *Jurnal Warta*, 50.